ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap)

Kristanti Rahman dan Dewi Widyastuti
Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap
kristantirahman@stiemuhcilacap.ac.id dan dewiwidii93@gmial.com

Abstrak

The purpose of this research is to analyze the factors that affect the value of financial reporting information. Factors that affect financial reporting information value is measured by the variable quality of human resources, utilization of technology and information, internal control systems.

The research approach used is associative. The respondents in this study 32 respondents. The sampling techniques used in this research is the saturated samples. Data collection is carried out by means of a detailed questionnaire. Research data was processed using SPSS. The research method used was multiple linear regression.

Human resources impact the value of the information financial statements. The utilization of information technology and the effect on the value of the information financial statements. The system of internal control to the value of the information financial statements. Human resources, internal control system technology and information utilization simultaneously impact the value of financial report information.

Keywords : Human resources ; Utilization of technology and information ; Internal Control Systems

1. Pendahuluan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance government)*, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntunan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hokum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dank kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban dan keterangan (Abdul 2012: 20). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Alifah, 2014).

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Cilacap sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Usaha mencapai terciptanya akuntabilitas kepada publik, pemerintah telah membuat regulasi yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Bentuk dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pada satu periode kepada para *stakeholders*. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hasil dari pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Apabila laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), artinya pemerintah daerah berhasil menghadirkan pemerintahan yang mampu mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas, jika laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ada potensi terjadinya kerugian keuangan daerah dan lemahnya pengendalian internal

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dan 2020 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK, hal ini sebuah peningkatan mengingat Kabupaten Cilacap 10 tahun sebelumnya selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemerikasaan BPK. Berdasar keadaan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peningkatan tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan komitmen organisasi yang mungkin sudah mulai diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.

2. Kajian Literatur

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan akuntansi suatu entitas pada suatu peride akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangn merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransakti yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan sebagai informasi. Laporan keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namu tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyakatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaanya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill),* pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untk melaksanakan pekerjaan (Harvesi 2005) .

Teknologi Informasi

Kemunculan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwahwuni, 2013:2). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir dan Triwahwuni, 2013:3). Menurut Darmawan (2014:16), secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut merupakan teknikteknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak

untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian intern dijelaskan dalam PP No. 8 Tahun 2006 dan PP No. 60 Tahun 2008. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yag efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_3: Sistim Pengendalian Internal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang didasarkan atas survei terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi atau jawaban responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden dengan jenis pernyataan yang bersifat tertutup.

Pertanyaan yang diajukan berjumlah 31 pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang dianalisis dalam penelitian ini menjelaskan Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Sistim Pengendalian Internal (X_3) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (Y) yang diukur dengan menggunakan skala ordinal. Dalam analisis data pada penelitian ini digunakan model persamaan yaitu model regersi linear berganda yang diformulasikan sebagai berikut: $\mathbf{Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \epsilon}$

Di mana: Y = Nilai Informasi Laporan Keuangan

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$= Koefisien Regresi

4. Hasil Pembahasan

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koef Reg	Std. Error	B	t	P
Konstan	0,469	0,529		0,886	0,383
Sumber Daya Manusia	0,209	0,252	0,237	0,828	0,414
Teknologi Informasi	0,532	0,207	0,611	2,571	0,016
Sistim Pengendalian Internal	0,080	0,142	0,089	0,563	0,578
R = 0,914					
R^2 = 0,836					
AdjustedR^2 = 0,818					
F = 47,528					

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2016)

Berdasarkan tabel 24 di atas maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 0{,}469 + 0{,}209X_1 + 0{,}532X_2 + 0{,}080X_3}$$

Dari Persamaan di atas menunjukan :

a. Koefisien regresi β_0 sebesar 0,469, artinya nilai konstanta atau besarnya nilai informasi laporan keuangan (Y) = 0,469 dengan asumsi Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Sistim Pengendalian Internal (X_3)=0
b. Koefisien regresi β_1 sebesar 0,209 menunjukan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) adalah Positif. Artinya semakin tinggi Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) maka Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) semakin tinggi. Dan sebaliknya semakin rendah Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) maka Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) semakin rendah.
c. Koefisien regresi β_2 sebesar 0,532 menunjukan bahwa variabel Pemanfaaan Teknologi Informasi (X_2) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) adalah Positif. Artinya semakin tinggi Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) maka Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) semakin tinggi. Dan sebaliknya semakin rendah Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) maka Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) semakin rendah.
d. Koefisien regresi β_3 sebesar 0,080 menunjukan bahwa variabel Sistim Pengenddalian Internal (X_3) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) adalah Positif. Artinya semakin tinggi Sistim Pengendalian Internal (X_3) maka Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) semakin tinggi. Dan sebaliknya semakin

rendah Sistim Pengendalian Internal (X_3) maka Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) semakin rendah.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tujuan dari uji hipotesis koefisien regresi secara parsial adalah untuk mengetahui apakah secara individual variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Didapatkan hasil pengujian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan Nilai t-hitung dan t-tabel

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}
Sumber Daya Manusia	0,828	1,69913
Teknologi Informasi	2,517	1,69913
Sistim Pengendalian Internal	0,563	1,69913

Berdasarkan tabel 25 di atas dapat dilihat bahwa :

1) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)

   Nilai t_{hitung} pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) adalah 0,828 maka H_0 diterima dan H_a ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,828< 1,69913). Hal ini menunjukan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y). Dengan demikian hipotesis I yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **ditolak**.

2) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)

   Nilai t_{hitung} pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) adalah 2,517 maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,517> 1,69913). Hal ini menunjukan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y). Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **diterima**.

3) Pengaruh Sistim Pengendalian Internal (X_3) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)

   Nilai t_{hitung} pada variabel Sistim Pengendalian Internal (X_3) adalah 0,563 maka H_0 diterima dan H_a ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,563< 1,69913). Hal ini menunjukan bahwa variabel Sistim Pengendalian Internal (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y). Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Sistim Pengendalian Internal (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **ditolak**.

Uji Simultan(Uji F)

Tujuan dari hipotesis koefisien secara serentak adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara serentak berpengaaruh terhadap

variabel terikat.

Tabel 3. Hasil Uji F_{hitung} *Reability Statistic*

F_{hitung}	F_{tabel}
47,528	2,93

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2016)

Berdasarkan tabel 26 di atas didapatkan hasil nilai F_{hitung} adalah 47,528 dan hasil nilai F_{tabel} adalah 2,93. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ artinya secara bersama-sama variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Infoormasi (X_2), Sistim Pengendalian Internal (X_3) berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap. Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Sistim Pengendalian Internal (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **diterima.**

4.1. Pembahasan

Pada pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **ditolak** atau variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y). Hal ini ditunjukan dengan didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,828< 1,69913) .

Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kualitas sumber daya manusia di subbagian keuangan,perencanaan dan aset yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, masih ada pegawai subbagian keuangan,perencanaan dan aset tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan.

Pada pengujian hopotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **diterima** atau variabel Pemanfaatan Teknologi Infomaasi (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y). Hal ini ditunjukan dengan didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,517 > 1,69913).

Terlihat disini Pemanfaatan teknologi dan informasi akan membantu pegawai untuk mencapai nilai informasi laporan keuangan yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat nilai informasi laporan keuangan dapat tercapai.

Pada pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sistim Pengendalian Internal (X_3) berpengaruhsignifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y) **ditolak** atau variabel Sistim Pengedalian Internal (X_3) tidak melmiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan

Keuangan(Y). Hal ini ditunjukan dengan didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,563< 1,69913). Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap belum diterapkan secara efektif, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap. Hal ini ditunjukan dari hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,828< 1,69913).
2. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap. Hal ini ditunjukan dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,517 > 1,69913).
3. Variabel Sistim Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap. Hal ini ditunjukan dari hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,563< 1,69913).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap
   Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap diharapkan mampu meningkatkan kinerja kerja pegawai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan sistim pengendalian internal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan dengan cara memperbanyak keikutsertaan pegawai dalam diklat-diklat atau pelatihan tentang akuntansi laporan keuangan, peraturan-peraturan yang ada dapat lebih ditingkatkan agar pegawai lebih disiplin dalam ketepatan waktu.
2. Saran bagi Pegawai
   Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Cilacap harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memberikan pengaruh terhadap kinerjanya dan juga meningkatkan serta menciptakan kualitas kerja yang baik.
3. Saran bagi Pihak Lain

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah variabel – variabel

lain seperti Kemampuan pengorganisasian, Kemampuan kepemimpinan, kemampuan pengendalian yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Abduh.2007. **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh"**. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

[2]. Alifah, 2014. **Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)**. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[3]. Kadir (2015) *Pengaruh Pemanfaatan teknologi dan informasi, Kesulitan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Nilai informasi laporan keuangan Nilai informasi laporan keuangan Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi

[4]. Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 2

[5]. Pituringsih, dkk. 2015. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi,Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur". Fakultas Akuntansi Universitas Mataram.

[6]. Pujiswara, dkk. 2014. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung)". Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.